

## KESEJAHTERAAN PENDAMPING DI WILAYAH PERKOTAAN (Studi Deskriptif Pendamping PKH di Jakarta Timur)

Dian Larasati

Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 17 Maret 2022

Publish: 25 Maret 2022

---

#### Keywords:

Welfare, Social Assistance, PKH

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 17 Maret 2022

Publish: 25 Maret 2022

---

### Abstract

*In all countries of the world, the problem of poverty is still a central global issue. The purpose of this study is to describe and analyze the welfare of PKH social assistants in East Jakarta and the factors supporting and inhibiting the welfare of PKH social assistants in East Jakarta. This research uses descriptive qualitative method. The results of this study reveal that the welfare of PKH social assistants that have been obtained so far includes subjective and objective welfare. Subjective well-being includes feelings of happiness in carrying out work as a social companion, satisfaction and others. Meanwhile, according to the welfare received by social assistants that are objective, namely covering aspects of income that are deemed sufficient only for daily needs, consumption expenditure aspects are only available when meetings are held, housing aspects are not available, there are no special health service aspects and no aspects of access to transportation that make it a separate obligation for social assistants for transportation costs. This study reveals that there are various supporting factors, namely villages, sub-districts working together to fight for the welfare of the facilitators. Meanwhile, the inhibiting factor is that the government does not immediately increase the salaries of the assistants.*

---

### Abstrak

Di seluruh negara dunia, masalah kemiskinan masih menjadi isu sentral global. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis yaitu kesejahteraan pendamping sosial PKH di Jakarta Timur dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat kesejahteraan pendamping sosial PKH di Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Kesejahteraan pendamping sosial PKH yang telah didapatkan saat ini meliputi kesejahteraan secara subyektif dan obyektif. Kesejahteraan subyektif meliputi perasaan bahagia menjalankan pekerjaan sebagai pendamping sosial, kepuasan dan lain-lain. Sedangkan menurut kesejahteraan yang diterima oleh pendamping sosial yang bersifat objektif yaitu meliputi aspek pendapatan yang dirasa mencukupi hanya untuk kebutuhan sehari-hari, aspek pengeluaran konsumsi hanya tersedia ketika rapat diadakan, tidak tersedianya aspek tempat tinggal, tidak adanya aspek layanan kesehatan secara khusus dan tidak ada aspek akses terhadap transportasi yang menjadikan kewajiban tersendiri bagi para pendamping sosial untuk biaya transportasi.. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat berbagai faktor pendukung yaitu para desa, kecamatan saling bekerja sama untuk memperjuangkan kesejahteraan para pendamping. Sedangkan untuk aktor penghambat belum di berikan nya Dana intensif atau tunjangan makan, keluarga, Dan kesehatan Karena gaji nya masih di bawah standard UMP (Upah Minimum Provinsi) dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap Pendamping di wilayahnya.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

### Corresponding Author

Dian Larasati

Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia

Email : [larasatidian77@gmail.com](mailto:larasatidian77@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Di seluruh negara dunia, masalah kemiskinan masih menjadi isu sentral global. Semua negara sepakat bahwa kemiskinan menjadi problematika yang menghambat kesejahteraan masyarakat (Indraddin & Irwan, 2016). Indonesia dengan segala kekayaan alam yang berlimpah ruah ditambah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, seharusnya mampu mengelola sumber daya alam dengan baik namun sayangnya dengan banyaknya jumlah penduduk yang dimiliki tidak diimbangi dengan potensi sumber daya manusia yang dimiliki (Purnamasari, 2019). Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber modal yang dimiliki, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, rasa malas bekerja yang dimiliki individu, dan tingginya beban hidup keluarga (Tazkiya, 2015).

Melihat fenomena ini, hal yang mendasar dalam permasalahan kemiskinan yaitu sumber penghasilan yang minim. Sumber penghasilan utama termasuk salah satu indikator dalam pemenuhan tingkat kesejahteraan, pada kenyataannya kesejahteraan dirasa sebagai kepuasan seseorang terhadap apa yang telah dilakukan (Djamhari et al., 2020). Dalam hal ini pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus mengoptimalkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang berdasarkan pada landasan yang termuat di dalam tujuan negara yaitu di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat yang menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Leks et al., 2013).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika angka kemiskinan di Indonesia maret (2020) berjumlah 9,78% dengan jumlah penduduk miskin 26,42 juta orang yang semula meningkat 0,56 % atau 1,63 juta orang di bulan September (2019) dan meningkat 0,37 % atau 1,28 juta orang di bulan Maret (2019). Bila kita bandingkan ada sekitar 1 (satu) dari 9 (sembilan) penduduk di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka dari itu pemerintah harus hadir dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020).

**Tabel 1.1** Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tahun 2019-2020

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
<b>Perkotaan</b>		
Maret 2019	9,99	6,69
September 2019	9,86	6,56
Maret 2020	11,16	7,38
<b>Pedesaan</b>		
Maret 2019	15,15	12,85
September 2019	14,93	12,60
Maret 2020	15,26	12,82
<b>Total</b>		
Maret 2019	25,14	9,41
September 2019	24,79	9,22
Maret 2020	26,42	9,78

*Sumber : Di olah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019 sampai dengan 2020 (Badan Pusat Statistik, 2021).*

Kemudian berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019-Maret 2020 jumlah penduduk miskin dipertanian 1,3 juta orang sedangkan dipedesaan naik sebesar 333,9 ribu orang dengan prosentase kenaikan di perkotaan 6,56 % menjadi 7,38 % sedangkan dipedesaan 12,60 % menjadi 12,82 %. Berdasarkan data diatas jumlah penduduk miskin dan prosentasi kenaikan terbesar daerah tempat tinggal masih tinggi di daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan pun merata bukan hanya di daerah pedesaan atau yang tertinggal

namun di daerah kota yang berdekatan dengan pusat kota dengan berbagai pembangunan yang ada juga mengalami kesenjangan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2021).

Oleh karenanya pemerintah telah mencoba mengupayakan dengan mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan program nasional yang berada di dalam naungan jaminan perlindungan social. Salah satu program yang dikeluarkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang didesain dan diperuntukan untuk memperbaiki kualitas dasar hidup masyarakat miskin (Habibullah, 2017). Program keluarga Harapan (PKH) di Indonesia sudah mulai dibentuk sejak 2007. PKH merupakan pemberian bantuan bersyarat atau *Conditional Cash Transfers (CCT)* yang sasarannya di fokuskan untuk keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam basis data terpadu penangan fakir miskin yang memiliki komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan komponen kesejahteraan social (lansia dan disabilitas) (Nurdiana, 2017).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program unggul nasional, Berdasarkan Pasal 2 Permensos No 01 Tahun 2018 dipaparkan bahwa tujuan PKH yaitu untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui fasilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social dan mampu merubah perilaku kemandirian keluarga penerima. Oleh karena itu seluruh sumber daya manusia (SDM) PKH tentunya harus berkompeten dan memiliki kecakapan yang terukur dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi. Pendamping yang senantiasa mendampingi kpm merupakan ujung tombak dalam keberhasilan program ini karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan proses dampingan yang dilakukan oleh SDM PKH maka akan mampu terwujudnya tujuan dari pelaksanaan program keluarga harapan.

Namun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ditemukan pula masalah-masalah yang terjadi dilapangan seperti pendamping harus bisa beradaptasi dengan pekerjaan lapangan, mampu menggunakan bahasa daerah local atau budaya sekitar karena mayoritas penerima bantuan adalah masyarakat pribumi ditambah ada beberapa kategori penerima dengan usia yang sudah masuk kategori lansia sehingga dalam berkomunikasi terkadang pendamping harus dibantu oleh masyarakat yang fasih menggunakan bahasa daerahnya. Di dalam bertugas pun pendamping harus siap menempuh medan atau menelusuri rumah-rumah warga. Walaupun demikian yang menjadi permasalahannya lain juga yaitu banyaknya tugas dan tanggung jawab pendamping serta pendamping yang dituntut harus berkompeten, hal ini tidak seimbang dengan kompensasi atau gaji yang diterima pendamping yang masih jauh dari rata-rata dari *Upah Minimum Regional (UMR)* bagi pendamping yang tinggal di daerah perkotaan, sehingga banyak diantaranya pendamping yang mencari pekerjaan lain atau *Double Job* untuk menambah biaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu pendamping seharusnya juga harus mendapatkan kesejahteraan yang layak dan adil.

Salah satu contoh kasus yang terjadi marak ini bahkan yang sangat fatal, seperti yang terjadi di wilayah Tangerang Selatan salah satu oknum pendamping bahkan terlibat melanggar hukum karena melakukan pungutan liar (pungli) dan bahkan menyimpan kartu ATM penerima sehingga penerima tidak menerima haknya (CNN Indonesia, 2021). Selain itu kasus ini ditemukan juga di Malang Jawa Timur ada oknum pendamping yang telah menyelewengkan dana bansos (bantuan social) PKH dengan modus menyimpan kartu ATM penerima dan tidak diberikan kepada penerima sehingga kasus ini pun berujung di kantor polisi (Harian Kompas, 2021). Melihat maraknya kasus tersebut menambah buruk kembali citra pendamping social, namun dalam hal ini tentunya tidak semua hal-hal tersebut dilakukan oleh pendamping, banyak pula pendamping-pendamping yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, hal ini harus didukung baik oleh pemerintah daerahnya bukan hanya pemerintah pusat namun pemerintah daerah karena pendamping PKH adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka pengetasan kemiskinan (Kemensos, 2021)

Demi terwujudnya Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik, maka sangat diperlukan kecakapan ataupun keterampilan (*Skill*) yang dimiliki oleh pendamping selain itu pendamping juga dibekali dengan mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh dinas setempat maupun pusat (Rahmawati & Kisworo, 2017). Agar program ini bisa terus berjalan dengan baik,

maka pendamping harus menunjukkan hasil kinerja kerja yang bagus oleh karenanya pendamping harus menunjukkan bahwa mereka merupakan SDM yang unggul, berkualitas, dan yang berkompeten di bidangnya sehingga pendamping harus memiliki komitmen tinggi dan juga motivasi kerja yang tinggi demi tercapainya tujuan pelaksanaan program keluarga harapan yang efektif dan efisien (Priyono, 2010).

Selain itu pendamping juga beraktivitas di lapangan karena bersentuhan langsung dengan penerima baik dalam melakukan pendampingan, advokasi, edukasi maupun tugas-tugas dalam mengumpulkan data yang sifatnya administrasi. Di sisi lain, saat melakukan pekerjaan lapangan baik berkenaan dengan pengumpulan data-data kpm, pendamping pun juga harus menyusuri wilayah-wilayah yang tentunya beragam medan terjangnya (Susantyo et al., 2018).

Di wilayah perkotaan tepatnya di Jakarta Timur dengan akses yang mudah, jalanan yang baik, rumah-rumah kpm yang jaraknya berdekatan namun jumlah rasio dampinganpun tidak seimbang sehingga hal ini menyulitkan pendamping dalam melakukan proses administrasi hal ini juga ditambah pula dengan pendapatan yang diterima pendamping PKH yang hanya mendapatkan gaji yang bersumber dari APBN, bila di lihat hal ini tidak seimbang dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) sehingga pendamping banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan sampingan lainnya tentunya untuk menambah pemasukan bagi kehidupannya (Kementerian Sosial, 2021).

Berbeda dengan Kabupaten lainnya, sumber daya manusia (SDM) PKH mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah, selain mendapatkan gaji dari APBN ada dana tambahan atau disebut dana sharing dari APBD Kabupaten Bogor dalam memperhatikan SDM PKH diwilayahnya, walaupun besarnya tidak banyak namun jelas adanya bentuk perhatian yang diberikan untuk SDM PKH dalam menjalankan tugasnya, walau begitu karena wilayah pedesaan akses-akses yang dilalui pendamping juga sulit, tentunya jarak antara desa satu dengan desa lainnya juga berjauhan, begitupun jarak rumah penerima manfaat dalam satu desapun jauh. Tujuan dari penelitian yaitu bertujuan mendeskripsikan serta melakukan analisis kesejahteraan pendamping sosial PKH di Jakarta Timur dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat kesejahteraan pendamping sosial PKH di Jakarta Timur.

## **2. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuannya menggambarkan, mendeskripsikan atau melukiskan permasalahan-permasalahan secara sistematis terkait fenomena yang akan diselidiki. menurut Poerwadari (2007) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan membantu peneliti untuk dapat merefleksikan pemikiran dan pemahaman yang diberikan oleh informan. Penelitian ini berlokasi di Sekretariat PPKH Jakarta Timur. Dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan penelitian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang mencakup data primer dan sekunder.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut hasil penelitian ini diungkapkan bahwa kesejahteraan pendamping sosial PKH yang telah didapatkan saat ini meliputi kesejahteraan secara subyektif dan obyektif. Kesejahteraan subyektif meliputi perasaan bahagia menjalankan pekerjaan sebagai pendamping sosial, kepuasan dan lain-lain (Sabarisman, 2019). Berdasarkan hasil wawancara diatas mengungkapkan bahwa pekerja sosial PKH sangat sejahtera berkaitan dengan kesejahteraan subyektif. Secara khusus, menjelaskan bahwa semakin banyaknya peristiwa menyenangkan yang terjadi, maka semakin bahagia dan puas individu tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aprilian Syifa; dkk, (2018), menjelaskan bahwa kepuasan dari subjektif pelaku usaha didominion store cukup tinggi. Rata-rata pelaku Wirausaha di dominion Store menikmati hidup mereka dan merasa bahwa semuanya berjalan dengan baik. Hidup mereka secara positif agak cacat, namun mereka merasa bahwa sebagian besar hidup mereka berjalan

dengan baik. Dalam perspektif tertentu, mereka merasa kurang terpenuhi. Bagaimanapun, sentimen ini dapat dikurangi dengan memberikan inspirasi.

Sedangkan menurut kesejahteraan yang diterima oleh pendamping sosial yang bersifat objektif yaitu meliputi aspek pendapatan yang dirasa mencukupi hanya untuk kebutuhan sehari-hari, aspek pengeluaran konsumsi hanya tersedia ketika rapat diadakan, tidak tersedianya aspek tempat tinggal, tidak adanya aspek layanan kesehatan secara khusus dan tidak ada aspek akses terhadap transportasi yang menjadikan kewajiban tersendiri bagi para pendamping sosial untuk biaya transportasi (TNP2K, 2018).

Kesejahteraan subjektif merupakan sesuatu yang berhubungan dengan kepuasan yang dirasakan oleh seseorang yang dihasilkan dari kualitas hidup, maka, pada saat itu, sasaran bantuan pemerintah hanyalah masalah sosial terukur yang mencakup bagian, kebutuhan manusia, kebutuhan finansial, dan kebutuhan ekologis (Mulyadi, 2018). Dalam sudut pandang Summers et al. (2012), mengkonseptualisasikan kebutuhan manusia yang esensial, khususnya kebutuhan fisiologis dan keamanan. Kebutuhan finansial setara dengan persyaratan yang aman di suatu tempat, di mana pekerjaan berarti bahwa pemenuhan kebutuhan keuangan mendasar, misalnya, biaya umum untuk barang-barang dasar, biaya pelatihan, pengaruh gaji, uang yang ditabung secara pribadi, kerangka keluarga. Demikian pula, jika delapan bagian ini bisa diklaim oleh rakyat, mereka sudah bisa dikatakan sejahtera. Namun demikian hal ini tidak lepas dari keempat komponen yang telah dikemukakan oleh Summers et al sebelumnya (Mulyadi, 2018).

Dilihat dari hasil observasi tersebut, kehadiran Program Keluarga Harapan (PKH) di tengah masyarakat miskin tentunya sangat mendukung dalam memfasilitasi bobot kelurahan pada keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya, seperti membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pembiayaan. bimbingan anak-anak mereka, membantu dalam mengumpulkan kebutuhan yang sehat untuk serta mendapatkan administrasi dari posyandu untuk bayi dan bayi, bantuan dari PKH merupakan perluasan untuk memenuhi rezeki yang besar bagi anak-anak, oleh karena itu PKH adalah program yang mencoba untuk lebih mengembangkan daerah. bantuan pemerintah (Amaliyyah, 2020).

Menurut Habibullah dalam (Rahmawati & Kisworo, 2017), Kolaborator PKH memiliki situasi sebagai kaki tangan pemerintah dan kaki tangan daerah sehingga diharapkan dapat menghubungkan berbagai kepentingan yang berasal dari otoritas publik dan kepentingan daerah setempat. Tugas pendamping PKH dalam kaitannya dengan gagasan pekerjaan buruh daerah adalah sebagai pekerjaan fasilitatif dan keahlian. Pekerjaan terkait dengan inspirasi, peluang, dan dukungan untuk daerah setempat. Sebagian dari tugas yang terkait dengan pekerjaan ini adalah mendemonstrasikan, mengatur dan menengahi, menawarkan bantuan, membangun kesepakatan bersama, dan mengoordinasikan dan menggunakan sumber. Disisi lain terdapat peran dalam keterampilan mendidik masyarakat. Pendamping memiliki peran secara aktif sebagai agen yang memberikan masukan secara positif dan direktif berdasarkan dari pengetahuan maupun pengalaman dari masyarakat yang sedang didampingi (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2015).

Targetan dan tujuan program PKH dapat tercapai diakibatkan adanya kerja keras dari para pendamping sosial maupun koordinator kota dari PKH dalam mencapai tujuan dari PKH itu sendiri. Oleh karena ujung tombak PKH ini adalah pendamping sosial, maka penting sekali kepala PKH di setiap daerah memperhatikan kondisi pendamping sosial. Dalam hal ini kesejahteraan karyawan sangatlah dibutuhkan untuk menunjang efektifitas pekerjaan dan juga agar tercapainya target perusahaan.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat berbagai faktor pendukung yaitu para desa, kecamatan saling bekerja sama untuk memperjuangkan kesejahteraan para pendamping. Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu pemerintah tidak segera menaikkan gaji dari pendamping. Dalam penelitian ini didukung oleh penelitian Ananda (Dita. 2012), Faktor-faktor yang mempengaruhi bantuan pemerintah terhadap pekerja super tahan lama di peternakan adalah kompensasi/gaji, penghargaan, waktu tambahan, motivator, beras dan minyak, administrasi kesejahteraan, dan pelatihan (Akbar, 2018). Berbeda halnya dengan pekerja yang tidak tahan lama

(seperti perwakilan pemikiran ulang atau semacamnya yang disebut pekerja harian mandiri), yang tidak mendapatkan imbalan, waktu tambahan, dorongan, beras, kesejahteraan dan administrasi sekolah dari organisasi perkebunan. Yang mereka dapatkan hanyalah kompensasi/gaji yang diberikan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. Jadi variabel-variabel ini tidak dapat digunakan untuk mengukur bantuan pemerintah dari perwakilan yang dievaluasi kembali.

#### 4. KESIMPULAN

1. Kesejahteraan pendamping sosial PKH yang telah didapatkan saat ini meliputi kesejahteraan secara subyektif dan obyektif. Kesejahteraan subyektif meliputi perasaan bahagia menjalankan pekerjaan sebagai pendamping sosial, kepuasan dan lain-lain. Sedangkan menurut kesejahteraan yang diterima oleh pendamping sosial yang bersifat objektif yaitu meliputi aspek pendapatan yang dirasa mencukupi hanya untuk kebutuhan sehari-hari, aspek pengeluaran konsumsi hanya tersedia ketika rapat diadakan, tidak tersedianya aspek tempat tinggal, tidak adanya aspek layanan kesehatan secara khusus dan tidak ada aspek akses terhadap transportasi yang menjadikan kewajiban tersendiri bagi para pendamping sosial untuk biaya transportasi..
2. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat berbagai faktor pendukung yaitu para desa, kecamatan saling bekerja sama untuk memperjuangkan kesejahteraan para pendamping. Sedangkan untuk aktor penghambat yaitu belum diberikan Dana intensif atau tunjangan makan, keluarga, Dan kesehatan Karena gaji nya masih di bawah standard UMP (Upah Minimum Provinsi) dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap Pendamping di wilayah nya.

#### 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang berkecimpung membantu menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih kepada Universitas Indonesia.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. (2018). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Anggota Organisasi. *Jiaganis*, 3(2), 2–6.
- Amaliyyah, R. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2019*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Aprilian Syifa; Cholichul Hadi; Dimasaryo Wicaksono; Fajrianti. (2018). GAMBARAN KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF (SUBJECTIVE WELL-BEING) PELAKU WIRUSAHA DI DOMINION STORE. *Ekp*, 13(3), 576.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 Persen. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/Persentase-Penduduk-Miskin-Maret-2020-Naik-Menjadi-9-78-Persen.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Survei Sosial Ekonomi Nasional. *Socio-Economic/Monitoring Survey*, 3, 1–112.
- DITA ANTANIA HANJANI. (2012). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KESEJAHTERAAN KARYAWAN OUTSOURCING PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II UNIT KEBUN SAWIT SEBERANG. *Jurnal Ilmiah*.
- Djamhari, E. A., Layyinah, H. R. A., & Prasetya, A. C. D. (2020). KONDISI KESEJAHTERAAN LANSIA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL LANSIA DI INDONESIA. In Maftuchan & Reviewer: (Eds.), *Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*. Prakarsa. [http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/rkd/2018/laporan\\_nasional\\_rkd2018\\_final.pdf](http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/rkd/2018/laporan_nasional_rkd2018_final.pdf)
- Indraddin, & Irwan. (2016). Strategi Dan Perubahan Sosial. In *Sosiologi*.
- Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. (2015). *PEMANFAATAN DAN PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA PETANI*

- DAN NELAYAN (*Survey Rumah Tangga Dan Best Practices*). Pusat Penelitian Dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos Dan Informatika Badan Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi Dan Informatika. Kementerian Sosial. (2021). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021. In *Kementerian Sosial Republik Indonesia* (P. 76).
- Leks, E. M., Adharinalti, Susetyo, D. S. B., Sakti, T., Natalia, L., Adinegara, M., Sulistyono, H., Lailiyah, A., Besturen, M., & Supriyadi. (2013). *Analysis And Evaluation Of Laws And Regulations On Public Housing*. 1–269.
- Mulyadi. (2018). KESEJAHTERAAN, KUALITAS HIDUP DAN KAITANNYA DENGAN LINGKUNGAN HIDUP. *Ilmu Lingkungan UNP Padang*, 2, 1–9.
- Nurdiana. (2017). *IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN MAMBI KABUPATEN MAMASA*. 110265, 110493.
- Priyono. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Penerbit Zifatama Publisher* (Vol. 53, Issue 9).
- Purnamasari, S. (2019). Penerapan Ekonomi Pembangunan. In *Ekonomi Pembangunan* (Vol. 5, Issue 1). [Http://Eprints.Unpam.Ac.Id/Id/Eprint/8600](http://Eprints.Unpam.Ac.Id/Id/Eprint/8600)
- Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan. *Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment*, 1(2), 161–169. <https://doi.org/10.15294/pls.v1i2.16271>
- Sabarisman, M. (2019). ROLE OF SOCIAL ASSOCIATION OF SOCIAL WELFARE IN DISTRICT IN IMPROVING THE WELFARE OF THE FAMILY OF RECEIVING BENEFITS Abstrak PENDAHULUAN Penanggulangan Kemiskinan Selalu Digiatkan Oleh Berbagai Lapisan Masyarakat Dan Pemerintahan Dari Tahun Ke Tahun . Sa. *Kesejahteraan Sosial*, 5(2), 145–161.
- Susantyo, B., Marjuki, & Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Indonesia). (2018). *Optimalisasi Peran Dan Fungsi Pendamping Sosial : Studi Di Empat Kota Di Indonesia*.
- Tazkiya. (2015). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan Itang. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 16(1), 1–30.
- TNP2K. (2018). *PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi*. 210. Website TNP2K ([Www.Tnp2k.Go.Id](http://www.Tnp2k.Go.Id))